

Forum Freedom 34, 9 Januari 2006

Tema: Globalisasi di Indonesia

Nara sumber : Arianto Patunru

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

Hamid Basyaib (HB) :

Selamat pagi, saudara...anda berjumpa lagi dalam Forum Freedom bersama saya, Hamid Basyaib, satu kerjasama *Freedom Institute* dan radio 68 H yang dipancarkan ke sekitar 50 radio lain di seluruh Indonesia. Pagi ini saya kedatangan tamu Dr. Arianto Patunru dari LPM UI. Resminya dia adalah wakil direktur lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat. Agak aneh kedengarannya namanya, gaya lama, bukan lembaga penelitian melainkan penyelidikan ekonomi dan masyarakat Universitas Indonesia. Selamat pagi bung Arianto?

Arianto Patunru (AP) :

Selamat pagi...

HB :

Kita ngomong tentang globalisasi minggu lalu kita berbicara secara umum dikaitkan dengan WTO yang baru berakhir di Hongkong sekarang akan berbicara khusus tentang Indonesia apa yang dilakukan, baik buruknya buat Indonesia. Kita akan mulai dari yang paling dasar seperti biasa, bagaimana seharusnya sikap dan posisi Indonesia di era global ini baik yang terkait dengan arangment-arangment bank dunia dan IMF ataupun apa yang anda sebut sebagai globalisasi alamiyah dan globalisasi sebagai fenomena yang tak terelakan. Indonesia itu bagaimana seharusnya?.

AP :

Seperti yang sudah saya katakan minggu lalu, semua aktor-aktor dalam globalisasi memiliki *interestnya* masing-masing, tidak akan terjadi transaksi tanpa adanya *interest* dari masing-masing pihak, selalu ada perkara berapa untungnya berapa ruginya itu masalah *degree* aja. Ketika mereka terlibat secara sadar atau tidak sadar terlibat dalam suatu transaksi, motivasinya adalah untuk mendapatkan G, mendapatkan keuntungan, dan itu terjadi juga dalam globalisasi.

Point saya adalah ketika kita memutuskan untuk membuka negara, membuka sekat-sekat negara. Kita sadar bahwa akan mendapatkan manfaat dari globalisasi, kenapa kita berdagang dengan orang lain karena kita berbeda dengan orang lain, buat apa kita berdagang kalau kita tidak berbeda? Itu prinsipnya Menurut saya Indonesia pun harus melakukan itu karena sebenarnya Indonesia mempunyai banyak potensi yang memungkinkan kita untuk menjual itu, mendapatkan hal lain yang sebenarnya kita tak bisa memproduksi dengan lebih baik ketimbang negara lain. Lagi-lagi ini kembali pada konsep keunggulan komparatif tadi.

Misalnya kita dapat membuat produk-produk pertanian dengan baik atau katakanlah tekstil. Kita jualan, kita pergi ke Jepang, ke Eropa atau negara-negara maju lainnya, katakan bahwa kita butuh teknologi. Tetapi kita tak bisa menghasilkan dengan efisien. Nah kita bisa efisien disini,

doble intensive. Dan itu perlu kita lakukan. Kenapa? Kalau kita menutup diri katakanlah kita mau menghasilkan dua-duanya teknologi juga labour intensive juga. Gak ada yang jalan jadinya setengah-setengah tapi gak ada yang jalan, lebih baik tukar, itu prinsipnya orang berdagang saling bertukar apa yang diproduksi masing-masing pihak. Dan selalu itu akan menguntungkan semua pihak. gamblang sekali.

HB :

Kira-kira kita punya sesuatu yang bisa kita hitung dengan mudah, apa *comparative advantage* kita melimpah, pertanian yang melimpah, tanahnya subur tambangnya melimpah. Dengan jelas begitu, kenapa masyarakat intelektual indonesia atau sebagian politisinya masih berbeda-beda melihat fenomena globalisasi?

AP :

Salah satu yang cukup menjadi kendala bagi kita adalah kita kelihatannya agak sulit untuk melihat kesempatan-kesempatan itu, ada banyak sekali didepan mata tapi kita tidak kita sadari. dan kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan kartu kita untuk bernegosiasi, terus ada yang bilang sebenarnya Indonesia tidak mempunyai keunggulan komparatif sama sekali. Sebenarnya kita pun kalah dari Thailand atau segala macam. Sekali lagi prinsipnya adalah siapapun dia, bagaimanapun miskinnya, selalu mamiliki keunggulan komparatif. Itu prinsip. Apalagi kita yang kaya raya.

Saya ambil contoh misalnya Banglades tahun 50an-60an dulu yang menguasai tekstil itu adalah Daewoo korea, kalau yang sekarang kita kenal Daewoo teknologi komputer, nah dulunya itu raja tekstil. Kemudian Amerika dan Eropa ketakutan. Karena mereka tidak bisa menampung tenaga kerja mereka disektor itu. Semua diambil alih oleh korea. Jadi mereka melakukan embargo terhadap Korea, mereka memberikan sanksi, kalau dikerjakan oleh industri Korea maka tidak bisa masuk pasar Amerika dan Eropa seperti sekarang di pertanian. Bisnis itu pintar kita jangan *underestimate*. Apa yang dilakukan ?. Korea adalah mereka merekrut 150 orangan dari Banglades yang upahnya lebih murah lagi. Mereka ditraining dan dilatih untuk menjalankan alat-alat pintar itu. Dan bagusya orang-orang Banglades ini menggunakan otaknya juga, mereka dapat ilmu pengatahuannya, mereka kembali ke Banglades, mereka bangun alat-alat tekstil itu berdasarkan pengetahuan yang mereka dapat dari Daewoo. Sekarang kita tahu Banglades jadi raja dalam tekstil, nah itu sebenarnya yang harus kita kembangkan. Kita berhubungan dengan orang lain, kita bertaransaksi segala macam ada interesnya mereka juga ada kepentingan, dan salah satu yang dapat kita ambil adalah pengetahuannya. Kita ambil pengetahuannya dan kita terapkan di Indonesia misalnya. Kalau Banglades bisa kenapa kita tidak bisa..

HB :

Nah itu, kita jadi paham sedikit, ngomong-ngomong soal itu saya jadi teringat bagaimana debat yang panjang sekali di kita ini sampai tahun 80an, saya kira tentang alih teknologi. Nah itu kelihatannya tidak berhasil, dibikin undang-undangnya pun belum sempat, belum juga jadi.

AP :

Ya, tapi alih teknologi ini akhirnya terjadi juga. Kita tidak bisa menafikan bahwa ada negara bahkan perusahaan yang agak konsisten dan clear dalam memberikan teknologinya.

HB :

Nah, mau kita kan dipaksa oleh undang-undang, kalau mereka memasukan modal disana, masukan mesin dan sebagainya. Dalam sekian puluh tahun harus sudah beralih. Ya, dan itu gak jalan.

AP :

Gak jalan dan disitu ada jalan atau ruang bagaimana peran pemerintah. Nah jarang-jarang kita memberikan ruang yang begitu besar pada pemerintah dalam ekonomi pasar, tapi ada dimana kita butuh institusi-institusi itu untuk membantu pasar itu supaya jalan, jadi bukan sebaliknya merusak pasar, tapi untuk menjamin supaya pasar itu bisa jalan. Dan salah satunya adalah dengan peraturan semacam itu. Tapi hati-hati juga kalau misalnya kita meminta Jepang katakanlah yang bertransaksi dengan kita untuk lima tahun semuanya harus mentraining Indonesia, kemudian kita tidak mempunyai kekuatan lain dalam bargaining, terus mereka back off, mundur, kita yang rugi, kita sudah lihat Nike pindah, Sony pindah itu kenapa? Itu karena kita ikut dalam sentimen yang diciptakan, sadar taupun tidak sadar, orang-orang yang mengatasnamakan rakyat, kasihan rakyat itu selalu digunakan, diatasnamakan. Misalnya orang-orang bilang Nike itu gak boleh, karena mempekerjakan anak-anak dibawah umur, terus ditutup. Mereka gak tahu bahwa di negara-negara berkembang, seperti Indonesia misalnya, justru itu merupakan salah satu tulang punggung mereka dalam perekonomian. Ketika misalnya di Meksiko diblokir, diembargo tekstilnya, baju-baju murah yang pada waktu itu merajai *WholeMarket* dan sekarang juga misalnya. Salah satu anggota kongres Amerika mengusulkan pada kongres untuk melarang impor baju-baju murah dari Banglades. Dan akibatnya apa. Salah satu penelitian yang dilakukakan LSM internasional Oxfam sendiri menemukan bahwa anak-anak itu tadi, yang oleh kongres Amerika mau diproteksi supaya tidak bekerja, itu bukannya kembali ke rumah atau sekolah. Mereka ke jalan jadi gelandangan, pengemis dan tidak sedikit yang menjadi pelacur. Itu ironis sekali.

HB :

Itu berarti katakanlah negara maju tidak mengerti konteksnya, Ia mengukur konteks negara lain dengan negara sendiri.

AP :

Jadi yang salah kaprah itu bukan hanya negara-negara berkembang, negara majupun seperti itu. Jagi globalisasi ini banyak sekali yang salah kaprah dimana-mana.

HB :

Jadi anda gak heran yah kalau intelektual dan politisi Indonesia pun masih kabur atau tidak jernih dalam globalisasi ini. Lalu bagaimana mengatasinya? Mestinya kan kalau kita melihat kepentingan bangsa sebagai satu kesatuan, tentu idealnya seluruh energi bangsa ini diarahkan kesatu tujuan, baru tujuan itu bisa berhasil, atau setidaknya tidaknya segala komponen bangsa sebanyak mungkin. Sekarang kan komponen-komponen yang penting misalnya kaum intelektual, anda tahu, saya merasakan bahwa saya kira kita cendikiawan di Indonesia ini sinis terhadap globalisasi.

AP :

Betul, saya pikir salah satu kuncinya adalah belajar bernegosiasi dengan baik. Alih-alih mengalihkan energi untuk melawan globalisasi. Bagaimana kalau energi tersebut dialihkan untuk belajar bernegosiasi

dengan baik. Maksud saya kita ini bangsa yang suka sekali tanda tangan, cari langsung tempat tanda tangan, tanda tangani. Dan itu isinya tidak dibaca, gak usah ikut meetingnya dan setelah itu shopping.

HB :

Anda maksudkan perunding-perunding tadi, berunding di Jenewa atau dimana-mana...

AP :

Jadi tidak melihat apa yang didalam buku tebal itu, dokumen itu yang disusun bertahun-tahun disusun oleh para ahlinya, tentu harus melalui pertimbangan yang serius. Ketika sudah terjadi dan ditanda tangan kemudian datang penyesalan dan selalu datang terlambat. Ketika presiden Suharto menandatangani *letter of intens* dengan Cam de Su dan bersedekap, semua orang marah. Itulah salah satu akibat, karena gak membaca dengan baik. Sebenarnya kita punya kartu dan sekali lagi tidak ada makan siang yang gratis. Negara-negara lain akan masuk sebagai investor, itu yang menguntungkan. Dan disitu seharusnya kita bisa melihat, bahwa kita kuat di labor misalnya, yang perlu pemerintah perjuangkan misalnya keselamatan kerja, jadi negosiasi dengan pemerintah Singapura gitu. Ketika mengirim TKI dan TKW bagaimana supaya ada hitam diatas putih, bahwa pemerintah Singapur mejamin keselamatan kerja tenaga kerja kita. Kita jangan terus berfokus pada upah minimum.

HB :

Atau bahkan pengiriman buruh murah itu sendiri dilarang dengan alasan martabat bangsa dan sebagainya...

AP :

Nah itu salah kaprah yang agak serius, kita malas untuk berdiri di dalam sepatu orang lain, kita mencoba merempayik atau berpikir menurut perpekstif orang lain, klau kita melarang burh murah ke Amerika, Arab Saudi, Malaysia atau Singapura, coba kita bayangkan kita adalah pengusaha Malaysia, kalau yang datang itu mempunyai *Skill Workers*, saya sebagai pengusaha atau pemerintah Malaysia, mengapa saya tidak menggunakan skill workers sendiri padahal saya punya banyak. Sementara mereka butuh *unskill workers* jadi melarang memberikan batasan *unskill workersnya* Indonesia pindah ke Malaysia atau ke Singapura untuk mencari return yang sebenarnya mereka bisa dapat, itu juga merupakan sesuatu yang salah, menurut saya, justru mereka mendapatkannya disitu lebih banyak. Ketimbang misalnya disini. Nah itu apa yang kita sebut sebagai *fleksible labor market*. Salah satu kunci untuk menghadapi globalisasi yaitu *fleksible labor market*.

HB :

apa yang dimaksud ?

AP :

Yang simple seperti ini, bayangkan misalnya satu rumah tangga, kebetulan mempunyai pembantu dua orang, katakanlah gajinya 500-600 ribu perbulan. Kita tahu bahwa upah minimum Jakarta itu satu juta, misalnya ada peraturan pemerintah bahwa UMR harus diterapkan juga dalam rumah tangga. Artinya pembantu tersebut harus satu juta. Kira-kira apa yang terjadi. Nah lagi-lagi kita harus berpikir sebagai employernya. Kira-kira apa yang akan dilakukan, kalau Ia seorang ibu rumah tangga yang agak sedikit marginal artinya untuk membayar kedua pembantunya tadi itu sudah termasuk berat. Kemungkinan besar dia akan mempekerjakan satu

orang, pecat yang satu. Artinya mengirim satu orang ke *unemployment* atau pengangguran. Peluang kerja hilang. Karena *labor marketnya* itu diproteksi sedemikian rupa, upah minimum harus sekian, justru itu merugikan orang tidak bekerja. Seluruh debat tentang upah minimum ini kadang kehilangan focus. Katakanlah banyak orang yang berdemonstrasi untuk meningkatkan UMR itu mereka tidak sadar, bahwa sebenarnya UMR itu menguntungkan orang-orang yang sudah bekerja. Dan mereka yang sudah bekerja yang bukan benar-benar di batas antara di pekerjaan atau tidak dipekerjakan. Karena kalau dibatas kemungkinan besar ia akan dipecat. Misalnya beberapa waktu yang lalu Indofood memecat 3500 orang dan yang lainnya juga memecat. Karena mereka tidak bisa membayar itu. Nah sekarang misalnya lebih *fleksible*, artinya kembali ke contoh rumah tangga tadi. Pemerintah sebaiknya bilang dinaikan tapi tidak menetapkan upah batas minimum. Si ibu tadi kemungkinan akan menaikkan ke enam ratus ribu. Karena kita percaya bahwa produktifitas itu sama nilainya dengan balas jasanya. Jadi dia akan bilang sebenarnya ditempat lain orang-orang di bayar satu juta, tapi saya gak mampu. Saya mau membayar anda enam ratus ribu, kamu tidak usah bekerja 12 jam sehari, cukup 7-8 jam sehari. Pertanyaan saya apakah itu lebih buruk dari pada membiarkan dia keluar menjadi pengangguran? Jelas ini lebih baik, karena dia masih bisa mendapatkan penghasilan dengan jalan kerja yang lebih murah. Ini yang dimaksud dengan *fleksible labor market*. Nah sekarang kenapa pengusaha-pengusaha agak ngeri masuk ke Indonesia karena *labor marketnya* terlalu rigid.

Jadi Indonesia itu sekarang kalau misalnya memecat pekerja dengan alasan apapun, kita ambil ekstrimnya saja, ada pekerja yang kedapatan mencuri, dikeluarkan. Peraturan Indonesia mengharuskan itu dibayar tiga puluh kali gajinya, itu paling tinggi di dunia sekarang. Pengusaha itu akan berpikir kalau saya masuk ke Indonesia, saya harus terikat dengan peraturan yang begitu rigid mendingan saya ke Malaysia aja atau Singapura atau Vietnam saja yang lebih gampang. Yang seperti ini kelihatan dari awal kelihatan bagus memperjuangkan nasib buruh tapi sebenarnya *back fire*, menendang diri mereka sendiri.

Jadi menurut saya orang-orang yang terlalu memperjuangkan UMR tanpa melihat konteksnya, itu sebenarnya.apalagi dari serikat buruh itu terjebak pada egoisme sendiri. Karena mereka ingin mengangkat harkat mereka sendiri, tapi tidak memperdulikan nasib orang-orang yang tidak bekerja. Karena orang-orang yang belum kerja tidak bias masuk, Karena ada insentif dari pengusaha untuk tidak mengambil yang lain-lain atau disinsentif untuk mempekerjakan orang-orang yang baru.

HB :

Nah sekarang kita kembali pada isu utama kita tentang globalisasi. Anda di LPEM bikin studi gak, misalnya mengidentifikasi, kalau asumsinya kita Indonesia punya *comparative advantage* dibidang-bidang tertentu. Nah sudah dihitung gak berapa nilainya ?

AP :

Kita melakukan studi secara periodical, kira-kira mana yang mempunyai *comparative advantage*, dan memang bias diduga tidak jauh dari pertanian. Yang memang higher intensive , kita jangan terlalu memaksakan bahwa kita mempunyai keunggulan teknologi, itu belum, masih jauh. Tapi memang kita mulai mengindustri tapi tetap basis pertanian, misalnya agrobisnis itu mulai naik.kemudian kita punya tekstil tapi kemudian diambil alih lagi oleh Cina karena buruhnya bersedia dibayar lebih murah, karena tadi mereka lebih fleksible. Sekedar ilustrasi saja

mereka yang mempunyai credit card katakanlah citybank atau yang lainnya kalau complain kenomor Amerika itu jangan kaget kalau yang jawab pakai bahasa Inggris tapi logatnya Cina, kenapa karena mereka berada di Cina bukan di New York. Karena mereka melihat ada tenaga kerja yang mau di bayar jauh lebih murah dibanding Amerika sendiri, jadi itu terjadi dimana-mana. Jika kita menelpon Tofry di Amerika itu di jawab di Cina, dan mereka bersedia bekerja subuh hari. Karena waktunya berbeda. Kalau bisnis melihat itu kenapa saya gak pindah saja kesana dan itu sama juga di Indonesia. Artinya peluang-peluang itu ada, dan kita dapat menggunakan seperti itu, nah ketika misalnya kita bilang butuh pemerintah, disinilah bagaimana pemerintah itu mencoba memberi kesempatan kepada penggunaan sumber daya-sumber daya dalam negeri dengan lebih optimal jangan malah dibatasi kiri kanan. Kelihatan awalnya seperti malindungi malah justru merusak.

HB :

Nah kembali ke pertanyaan tentang identifikasi tantangan pertanian. Komoditi apa?

AP :

komoditinya secara spesifik yaitu kelapa sawit, kita memang masih nomor 1-2 dengan Malaysia. Nah kalau itu, kembali lagi distorsi. Pemerintah mau mengadakan pajak ekspor terhadap CPO, artinya orang-orang yang mau mengekspor CPO harus dikenai pajak, mereka harus bayar yang tinggi kepada pemerintah, nah kembali lagi ini menjadi *disinsentive* bagi industri. Kita putus asa juga begitu banyak kesempatan yang akhirnya di blok sendiri dengan peraturan-peraturan seperti itu.

HB :

Saya ini orang awam, tapi tiap hari baca koran terus, perilaku birokrat kita seperti tidak peduli pada kepentingan bangsa ini, apalagi kaitannya dengan negara lain, semua tindakannya itu menghambat persaingan dengan negara lain. Apalagi kalau kita kontraskan dengan Cina, baru-baru ini kita baca laporan yang sangat panjang di Kompas, kesal sekali padahal itu baru permukaan. Kalau ada studi yang lebih mendalam, kita lebih marah lagi. Kenapa pejabat-pejabat kita itu sering membuat peraturan *disinsentive* tadi?

AP :

Mungkin karena kemalasan dalam melihat jangka yang lebih panjang, dilihatnya itu jangka pendek terus. Bagaimana supaya dapat menghasilkan, langsung kelihatan, tentu saja menguntungkan bagi politisi, karena langsung bisa dilihat oleh rakyat, tapi dalam jangka panjang sebenarnya mereka sedang menciptakan bom waktu. Seperti tadi misalnya UMR terlalu tinggi, pajak ekspor dan sebagainya, itu justru menghambat. Salah satu contohnya lagi pemerintah selalu bilang bahwa produk Indonesia daya saingnya rendah. Cuma yang anomali adalah ketika masuk ke pabrik-pabrik, katakanlah di Jakarta timur, kita masuk ke sana. Sebenarnya sistem produksi mereka bagus, manajemen mereka bagus, sumberdaya mereka bagus, terus apa yang salah? Kenapa tidak kompetitif. Terus kita tanya dan berbicara pada mereka, ternyata yang bikin tidak kompetitif itu adalah inefisiensi yang diluar kontrol mereka. Ketika barang-barang ekspor itu keluar dari pabrik, dibawa dengan kontainer, mereka harus bersaing dengan bis kopaja, metro mini dan mobil pribadi. Karena tidak ada akses langsung kawasan industri tersebut ke pelabuhan. Tidak ada jalur sendiri, terjebak dengan kemacetan, begitu masuk tol macet disitu, sebenarnya jika tidak ada kemacetan, mereka bisa pulang

balik 40-50 kali tapi karena kemacetan katakanlah setengahnya, cuman 10-20 kali itu kerugiannya luar biasa.

Kemudian mereka berhasil masuk tol, masuk ke pelabuhan begitu lagi, macet berjam-jam, begitu masuk mereka di sodori dokumen-dokumen barbagai macam, katakanlah yang resminya ada lima atau empat tapi tiba-tiba menjadi sepuluh, sebelas atau dua belas. Masing-masing lima puluh ribu. Pengusaha mikir kalau saya tanggung semua ini gak adil, bagaimana kalau saya *share* sebagian masalah ini ke konsumen, bagaimana harga dinaikan, itu yang menjelaskan kenapa kita tidak kompetitif. Kita juga apresiasi hal-hal baik yang sudah dilakukan pemerintah, misalnya kemarin dengan apa yang disebut dengan fakta oktober setelah kenaikan harga BBM, itu bagus. itu *insentive* salah satunya mengurangi biaya di pelabuhan dengan terminal handing charge dari dari 150 menjadi 90an, jadi mengurangi biaya-biaya segala macam, dan mengurangi jembatan-jembatan timbang. Jembatan timbang di kita banyak sekali, selau muncul korek api dan itu dikurangi dan itu satu hal yang positif.

HB :
Apa harus dihapus sekalian?

AP :
Ada juga argumen yang masih bisa diterima, bahwa tujuan awal jembatan timbang adalah untuk melindungi jalan, jangan sampai *over weight*, sehingga jalannya rusak, tapi terlalu banyak juga rawan korupsi. Kemudian undang-undang perpajakan juga diperbaiki, mungkin iklim investasi akan lebih baik. Investasi masuk. Kalau kita baca artikel-artikel atau ayat-ayatnya banyak yang lucu-lucu. Misalnya dikatakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran harus diganjar dengan denda 5 juta sampai 50 juta. Ini besar sekali dan membuka ruang untuk negosiasi dan korupsi tentu saja..

HB :
Menarik sekali bung AP, tapi karena keterbatasan waktu kita akhiri saja, terimakasih....